

FISHERY BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY IN INDRAGIRI HILIR REGENCY, RIAU PROVINCE

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROPINSI RIAU

Lathifatul Rosyidah^{*1} and Mei Dwi Erlina²

^{1,2)} Agency for Marine and Fisheries Research and Human Resources,
Gedung BRSDM KP I Komplek Bina Samudera, Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia, 12230

Received: March 12, 2018 /Accepted: April 29, 2018

ABSTRACT

Indragiri Hilir Regency has great potential in catch fisheries sector. However, many obstacles and challenges faced by local governments in the development of capture fisheries business, due to various factors. The objectives of this research are: 1) to identify the potential of capture fisheries, ie facilities and infrastructure, and the existing condition 2) to formulate the strategy of developing the capture fishery business. This research used qualitative and quantitative approach. The data collected includes primary and secondary data. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews and FGDs with business actors, as well as stakeholders in Indragiri Hilir District equipped with observations and documentations. Data analysis used SWOT method by first analyzed the internal and external factors that produced 3 alternative strategies. These alternative strategies then re-analyzed using the QSPM analysis unit to determine priority strategies. The results of this research is the potential of capture fisheries in Indragiri Hilir Regency is very large, but there are still many obstacles due to facilities and infrastructure support is still minimal. Alternative strategies generated in this study are 1). utilization of fisheries and marine resources through improvement of facilities and infrastructure of environmentally friendly fishing units, 2). optimizing the role and function of TPI through PPI development, 3). increasing the role of "Pokmaswas" through the provision and utilization of monitoring facilities.

Keyword: catch fishery, SWOT, QSPM, Indragiri Hilir.

ABSTRAK

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi yang besar di sektor perikanan tangkap. Namun, banyak kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengembangan usaha perikanan tangkap karena berbagai faktor. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengidentifikasi potensi perikanan tangkap meliputi sarana dan prasarana, dan kondisi eksisting 2) merumuskan strategi pengembangan usaha perikanan tangkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan FGD terhadap pelaku usaha penangkapan, serta pemangku kepentingan di Kabupaten Indragiri Hilir dilengkapi dengan observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode SWOT dengan menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan usaha perikanan. Hasil analisis SWOT selanjutnya dianalisis kembali dengan menggunakan unit analisis QSPM untuk menentukan urutan strategi prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan untuk mengembangkan potensi perikanan tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sarana dan prasarana pendukung yang masih minim. Alternatif strategi yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu 1). Pemanfaatan sumberdaya KP melalui peningkatan sarana dan prasarana unit penangkapan ramah lingkungan, 2). Mengoptimalkan peran dan fungsi TPI melalui pembangunan PPI, 3). Meningkatkan peran Pokmaswas melalui penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pengawasan.

Kata kunci: perikanan tangkap, SWOT, QSPM, Indragiri Hilir.

^{*} Corresponding author: Lathifatul Rosyidah, lathifa23@gmail.com

Agency for Marine and Fisheries Research and Human Resources, Gedung BRSDM KP I Komplek Bina Samudera, Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia, 12230

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dengan panjang garis pantai sejauh 81.000 kilometer. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang kelautan dan perikanan. Menurut Lasabuda (2013), potensi lestari perikanan Indonesia sebesar 6,4 juta ton per tahun yang terdiri dari ikan pelagis (1,16 juta ton), pelagis kecil (3,6 juta ton, ikan demersal (1,36 juta ton), udang penaeid (0,094 juta ton), lobster (0,004 juta ton), cumi-cumi (0,028 juta ton), dan ikan karang konsumsi (0,14 juta ton). Kontribusi PDRB pada sub sektor perikanan sebesar 23 persen dari kategori sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun, tingkat pemanfaatan perairan di wilayah ini sebenarnya masih tergolong rendah. Berdasarkan data BPS (2015) sumberdaya perikanan laut dengan potensi 109.212 ton baru dimanfaatkan sebesar 37.781, 27 ton (34,59%).

Fakta menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir masih perlu dibenahi. Sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan mayoritas merupakan nelayan kecil dengan armada yang sederhana sehingga hasil tangkapan mereka juga sangat minim. Hal ini juga diperparah dengan masih digunakannya alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan racun, mini trawl dan perbedaan penggunaan alat tangkap aktif (jaring yang ditarik) dan alat tangkap pasif (jaring yang dibiarkan menetap) yang dapat memicu konflik antara nelayan karena menyebabkan jaring antara nelayan sering bertabrakan. Tingkat pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah juga masih belum maksimal dikarenakan minimnya armada pengawasan dan SDM. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yang dapat meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir. Muliawan (2014) menjelaskan bahwa perencanaan strategi (*strategies planning*) menitikberatkan pada formulasi strategi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada rencana kebijakan.

Penelitian pada sektor perikanan tangkap sudah banyak dikaji. Amrizal dan Zulkarnain (2006) pernah melakukan kajian strategi pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, namun hanya berdasarkan proses dinamika yang terjadi di masyarakat. Selain itu, survey yang dilakukan hanya pada satu lokasi kurang mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pengembangan perikanan secara holistik di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sari (2009) mengkaji strategi pengembangan perikanan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, teknologi, dan pemasaran. Selanjutnya, dia merumuskan strategi pengembangan perikanan hanya berdasarkan analisa terhadap potensi maksimum lestari (MSY) komoditas ikan unggulan. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji sektor perikanan tangkap dengan fokus pada beberapa aspek penting yang berperan dalam keberhasilan pengembangan perikanan tangkap di Indragiri Hilir.

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi perikanan tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir meliputi sarana dan prasarana, dan kondisi eksisting mengenai potensi perikanan tangkap, mengidentifikasi kelembagaan usaha perikanan tangkap mulai dari input, produksi, dan

pemasaran. Hasil identifikasi perikanan tangkap dan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatannya kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun strategi pengembangan usaha perikanan tangkap. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan secara langsung kepada pemerintah terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dalam merumuskan kebijakan dan program pengembangan sektor perikanan tangkap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau pada tahun 2016 menggunakan metode survey dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mix method*). Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta FGD. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan publikasi ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu baik berupa laporan tahunan, data kecamatan dalam angka, kabupaten dalam angka dan publikasi lainnya.

Wawancara dilakukan secara *purposive* kepada informan dengan menggunakan kuesioner. Pemilihan Informan/responden dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, diantaranya sudah mendiami lokasi lebih dari dua tahun (masyarakat nelayan), mewakili unsur keterwakilan, dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Adapun informan yang diambil terdiri dari unsur SKPD, tokoh adat dan masyarakat, bakul/tengkulak, nelayan. Kemudian, untuk mengkonfirmasi informasi yang didapat, dilakukan triangulasi. Menurut Bachri (2010), triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data lain atau berbagai paradigma triangulasi lainnya untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data. Data yang dinyatakan valid melalui triangulasi akan memberikan keyakinan terhadap peneliti tentang keabsahan datanya. Triangulasi pada penelitian ini untuk memeriksa kembali hasil temuan kuesioner dan FGD.

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dikelompokkan, disusun, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sedangkan data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik sederhana. Penentuan strategi pengembangan perikanan tangkap menggunakan unit analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*). Selanjutnya setelah strategi didapatkan, dilanjutkan analisis untuk menentukan urutan prioritas strategis yang akan dijalankan dengan menggunakan analisis QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nelayan di kabupaten Indragiri Hilir mayoritas merupakan nelayan tradisional. Triyanti (2014) menjelaskan bahwa nelayan memiliki ciri-ciri diantaranya memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kondisi alam pada saat melakukan kegiatan melaut. Jumlah produksi perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir lebih banyak ditunjang dari hasil laut dimana pada tahun 2015 hasil

produksi perikanan laut sebanyak 43.973,61 ton, sedangkan hasil produksi tangkap perairan umum sebesar 8.078,79 ton. Jumlah total produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 meningkat dari sebelumnya 50.386,89 ton pada tahun 2014 menjadi 52.052,40 ton pada tahun 2015. Produksi perikanan tangkap menurut kecamatan dan subsektor di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2015 tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Dan Subsektor Di Kabupaten Indragiri Hilir Pada Tahun 2015.

				Satuan: Ton
No	Kecamatan	Perikanan Laut	Perairan umum	Jumlah
1	Kuindra	7.341,16	74,3	7.415,46
2	Tanah Merah	9.474,18	3.264,03	12.738
3	Rete	1.564,14	84,39	1.648,53
4	Mandah	7.328,02	460,25	7.788,27
5	Kateman	4.082,85	118,77	4.201,62
6	Pualu Burung		46,27	46,27
7	Pelangiran		81,87	81,87
8	TL. Belengkong		117,66	117,66
9	Tempuling		497,14	497,14
10	Tembilahan		309,68	309,68
11	Tembilahan Hulu		265,78	265,78
12	Gas	231,3	71,52	302,82
13	Batang Tuaka		271,71	271,71
14	Enok		428,33	428,33
15	Keritang		373,75	373,75
16	Kemuning		45,09	45,09
17	Gaung	162,52	403,84	566,36
18	Concong	9.136,62	697,66	9.834,28
19	Kempas		280,01	280,01
20	Sungai Batang	4.652,82	186,74	4.839,56
Jumlah		43.973,61	8.078,79	52.052,40

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, 2016

Jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2015 sebanyak 3.916 RTP dengan jumlah produksi mencapai 43.973,61 ton. Jumlah RTP terbanyak berada di Kecamatan Kuindar yaitu sebanyak 968 RTP, namun untuk hasil produksi terbanyak dihasilkan dari Kecamatan Tanah Merah yaitu 9.474,18 ton dan Kecamatan Concong 9.136,62 ton. Jumlah RTP di Kecamatan Concong yang hanya 248 RTP mampu menghasilkan jumlah produksi yang besar dikarenakan nelayan dari beberapa daerah menjual hasil tangkapannya di daerah tersebut. Jumlah RTP dan hasil produksi perikanan laut pada per kecamatan pada tahun 2015 seperti pada Tabel 3.

Jenis perahu yang digunakan oleh nelayan mayoritas merupakan perahu tanpa motor yaitu sebanyak 3.373 buah dan kapal motor sebanyak 1.363 buah sehingga jumlah perahu keseluruhan di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 4.76 buah. Hal ini berarti bahwa nelayan di Kabupaten Indragiri Hilir masih didominasi nelayan kecil. Sejalan dengan pendapat Retnowati (2011), sektor

perikanan tangkap di Indonesia masih didominasi nelayan tradisional dengan skala penangkapan yang kecil. Jumlah perahu per kecamatan menurut jenis perahu dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3. Rumah Tangga Perikanan Perairan laut dan produksi Perikanan laut di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2015.

No	Kecamatan	RTP (Unit)	Produksi (Ton)
1	Kuindra	965	7.341,16
2	Tanah Merah	779	9.474,18
3	Rete	418	1.564,14
4	Mandah	474	7.328,02
5	Kateman	284	4.082,85
6	Pualu Burung	100	
7	Pelangiran	-	
8	TL. Belengkong	-	
9	Tempuling	-	
10	Tembilahan	4	
11	Tembilahan Hulu	-	
12	Gas	1	231,30
13	Batang Tuaka	2	
14	Enok	1	
15	Keritang		
16	Kemuning	-	
17	Gaung	-	162,52
18	Concong	248	9.136,62
19	Kempas	-	
20	Sungai Batang	640	4.652,82

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, 2016.

Tabel 4. Jumlah Perahu Per Kecamatan Menurut Jenis Perahu di Kabupaten Indragiri Hilir Pada Tahun 2015.

Satuan: Unit			
No	Kecamatan	Perahu Tanpa Motor	Kapal motor
1	Kuindra	151	198
2	Tanah Merah	263	286
3	Rete	301	108
4	Mandah	695	191
5	Kateman	201	104
6	Pualu Burung	45	35
7	Pelangiran	81	12
8	TL. Belengkong	116	10
9	Tempuling	200	8
10	Tembilahan	86	22
11	Tembilahan Hulu	93	11
12	Gas	157	32
13	Batang Tuaka	120	23
14	Enok	160	24
15	Keritang	94	6
16	Kemuning	24	-
17	Gaung	85	16
18	Concong	168	171
19	Kempas	66	4
20	Sungai Batang	267	102
Jumlah		3.373	1.363

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016

Kondisi Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada usaha perikanan tangkap sangat penting. Hal ini berkaitan dengan sifat hasil tangkapan yang *perishable* (mudah busuk) sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini, kondisi eksisting sarana dan

prasarana di Kabupaten Indragiri Hilir berupa tempat pendaratan ikan, pabrik es dengan kapasitas 10 ton/hari, pos pengisian BBM bersubsidi untuk nelayan, dermaga, dan kapal pengawas. Sarana prasarana perikanan tangkap dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sarana dan Prasarana yang tersedia pada sektor Perikanan Tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir 2016.

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Lokasi	Dana
1	Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	5	Kateman, Mandah, Tembilahan, Concong dan Tanah Merah	APBD
2	Pabrik Es kapasitas 10 ton/hari	1	Tembilahan	APBN
3	Pembangunan POM BBM Bersubsidi untuk nelayan	1	Tanah Merah	APBN dan Swasta
4	Dermaga sandar/tambat kapal nelayan	5	Pulau Ruku, Kuala Patah Parang, Sungai Laut, Sungai Buluh, Tj. Pasir, Bekawan	DAK- APBN
5	Kapal Nelayan Lengkap dengan alat tangkap	4.318	Se-Kab. Inhil	APBD Kab, Provinsi dan APBN
6	Kapal Pengawas	1	Tembilahan	APBN

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Indragiri Hilir, 2016.

Sarana dan prasarana penangkapan di Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar belum beroperasi maksimal, misalnya TPI hanya berfungsi sebagai tempat pendaratan ikan. Kegiatan pelelangan di TPI juga belum dijalankan sama sekali. Selama ini sistem penjualan hasil tangkapan ikan dilakukan *person to person*.

Sebagaimana relasi sosial yang umum terjadi pada nelayan, relasi sosial di Kabupaten Indragiri Hilir juga bersifat *patron-client*[†]. *Patron* dalam hal ini adalah pemilik modal yang mayoritas berasal dari keturunan tionghoa, sedangkan *client* adalah nelayan yang mayoritas dari suku Duano, dan sebagian kecil suku Bugis, Jawa, Banjar, Minang, dan Melayu. Sistem ini berkaitan dengan sistem permodalan dan pemasaran hasil tangkapan nelayan. Persoalan klasik yang dihadapi nelayan dalam akses permodalan bahwa lembaga keuangan (perbankan atau pegadaian) menilai usaha penangkapan ikan berisiko tinggi, tergantung musim, dan hasil yang tidak menentu (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2014).

Bentuk relasi sosial semacam ini dinilai nelayan memberikan manfaat kepada mereka khususnya saat masa-masa paceklik atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Pada saat musim paceklik, nelayan membutuhkan bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saat tidak melaut. Bantuan ini hanya bisa diberikan oleh *patron* yang dalam hal ini disebut *toke* tanpa menggunakan

[†] *Patron-Client* : pertukaran hubungan antara kedua peran atau sebagai hubungan antar individu yang memiliki status sosial ekonomi tinggi (*patron*) menggunakan sumberdaya untuk menyediakan perlindungan atau keuntungan bagi seseorang yang statusnya rendah (*client*). Kemudian *client* membalas dengan jasa pribadi kepada *patron* (Scott, 1993)

jaminan seperti yang dipersyaratkan oleh lembaga permodalan formal. Selain itu, *toke* sebagai pemilik kapal/modal berperan dalam memenuhi biaya operasional nelayan saat melaut. Nelayan juga tidak perlu memikirkan kemana harus menjual hasil tangkapan karena sudah diurus oleh *toke*. Namun, dengan sistem ini, sebetulnya berimbas pada terjadinya kemiskinan nelayan.

Sistem *patron-client* antara nelayan dan *toke* mensyaratkan nelayan untuk menjual hasil tangkapan mereka hanya kepada *toke* yang bersangkutan. Nelayan tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga jual hasil tangkapan dikarenakan sudah ditentukan oleh *toke*. Dengan adanya sistem ini, keberadaan negara kurang memiliki peran terhadap dukungan peningkatan kesejahteraan nelayan khususnya dalam hal permodalan. Padahal, sistem *patron-client* semacam ini berdampak pada kesulitan nelayan dalam meningkatkan taraf perekonomian mereka. Juliantoro dan Munandar (2016) menyebutkan bahwa selama ini faktor yang menyebabkan nelayan enggan berhubungan dengan lembaga permodalan formal yaitu lembaga non formal lebih agresif dan proaktif dalam mengakomodasi kepentingan kepada nelayan, sementara lembaga formal dalam mengucurkan bantuan pemerintah tidak dapat langsung diakses oleh para nelayan. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengurangi dominasi *toke* pada penentuan harga jual hasil tangkapan nelayan melalui lembaga permodalan formal seperti koperasi, BUMD maupun perbankan.

Jenis perahu yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan memiliki ukuran yang kecil dengan kapasitas mesin yang minim sehingga *fishing ground* yang dapat dijangkau oleh nelayan hanya sejauh kurang dari 10 mil yang waktu antara satu hingga dua jam. Keberadaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sangat penting mengingat faktor geografis perairan di Kabupaten Indragiri Hilir rentan terhadap *illegal fishing*. Pokmaswas di Kabupaten Indragiri Hilir sudah terbentuk, namun sarana untuk melakukan pengawasan terbatas karena dibutuhkan biaya operasional yang cukup besar. Selama ini upaya mengurangi pelanggaran penggunaan alat tangkap yang dilarang, Dinas Kelautan dan Perikanan hanya melakukan sosialisasi melalui pemasangan baliho hingga siaran radio lokal. Pengawasan sangat penting untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (Efriansyah, 2016).

Sarana tangkap yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Indragiri Hilir berkapasitas minim dengan hasil tangkapan yang terus mengalami tren penurunan kuantitas. Hasil wawancara dengan nelayan di desa Sungai Salak, Kecamatan Tembilihan, perahu yang digunakan berupa perahu pompong dengan harga berkisar 2,4 juta dan mesin 75 PK yang dibeli seharga 1,5 juta rupiah. Jenis alat tangkap yang digunakan salah satunya disebut "belat" yaitu sejenis alat tangkap pasif yang dipasang di pantai sepanjang 200 meter pada saat air laut surut dan pada saat pasang, belat tersebut ditarik. Permasalahan mengenai penurunan jumlah hasil tangkapan dimungkinkan karena armada hasil tangkapan yang minim sehingga nelayan kalah bersaing dengan nelayan dari wilayah lain yang menggunakan armada dengan ukuran yang lebih besar.

Potensi perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir didukung oleh sungai dan laut yang luas hingga Laut Cina Selatan atau belakangan pemerintah menngganti nama menjadi Laut Natuna Utara. Jumlah nelayan yang cukup banyak dan sistem perdagangan untuk ekspor yang cukup menjanjikan seharusnya bisa menyumbang PAD bagi kabupaten ini. Namun, masalah muncul karena banyak *toke*/pedagang pengumpul yang mengirimkan ikan yang akan diekspor ke wilayah Jambi sehingga pencatatan hasil ekspor yang mendapatkan nama dan pajak adalah Jambi. Kabupaten Indragiri Hilir tidak mendapatkan apapun, bahkan hasil produksi tangkap pun sulit untuk dilakukan pencatatan secara administratif.

Pemasaran hasil tangkapan ikan tidak memerlukan pelaku atau tenaga kerja yang berbeda. Hasil tangkapan dijual langsung kepada Toke yang ada di wilayah tempat tinggal nelayan. Jika hasilnya melimpah, akan dijual ke toke di luar wilayah kecamatan. Hal ini sejalan dengan Sarwanto (2014) yang menyebutkan bahwa pemasaran ikan skala kecil seringkali belum mencapai kondisi yang ideal. Jumlah modal untuk usaha penangkapan ikan di Kabupaten Indragiri Hilir hanya dibedakan pada skala usaha. Kebanyakan usaha penangkapan ikan di kabupaten ini menggunakan armada yang minim dengan alat tangkap yang sederhana. Hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Indragiri Hilir umumnya berupa udang galah, udang rebon, udang manthis, dan jenis ikan ekonomis tinggi lainnya.

Analisis Faktor Internal

Analisis faktor internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir dibuat dalam matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) seperti pada Tabel 7.

Tabel 7. Internal Factor Analysis Summary Perikanan Tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, 2016.

No	Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skoring	Total
Kekuatan					
1	Potensi Sumberdaya Perikanan Melimpah	0,28	4,93	1,40	6,91
2	SDM Nelayan Cukup Banyak	0,26	4,50	1,19	5,34
Jumlah					12,25
Kelemahan					
1	Kelembagaan Kelompok	0,17	3,82	0,64	2,44
2	Teknologi	0,17	3,45	0,57	1,97
3	Sarana dan Prasarana	0,09	3,84	0,36	1,40
4	Pengawasan	0,02	3,82	0,06	0,22
5	Permodalan	0,01	3,21	0,03	0,11
Jumlah					6,15

Berdasarkan identifikasi faktor internal strategis pada penilaian bobot, rating, dan skor terhadap setiap faktor kekuatan dan kelemahan didapatkan nilai 12,25 dan 6,15.

Analisis Faktor Eksternal

Analisis faktor eksternal atau disebut EFAS (*External Factor Analysis Summary*) digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam pengembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir. Matriks tabel EFAS selengkapnya pada Tabel 8.

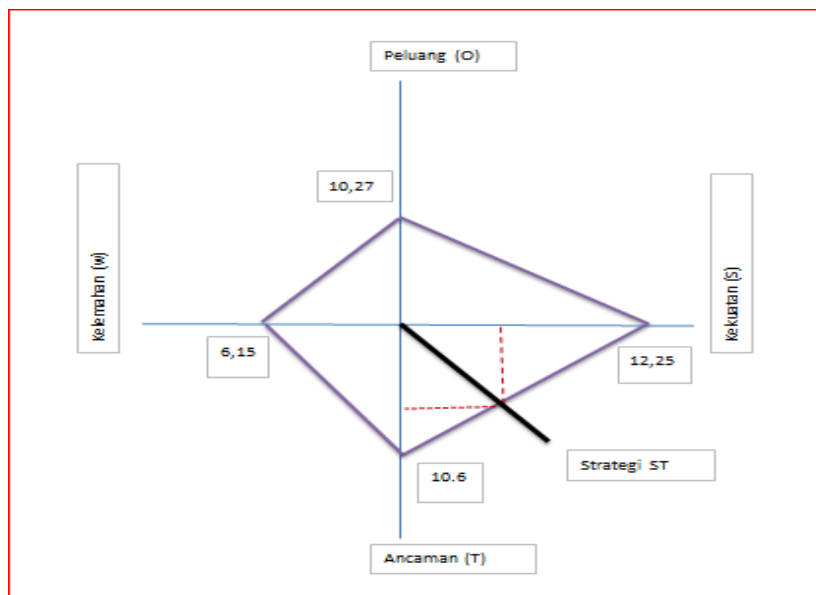
Tabel 8. Eksternal Factor Analysis Summary Perikanan Tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, 2016.

No	Faktor Strategis Internal	Bobot	Rataan Rating	Skoring	Total
Peluang					
1	Tersedianya Program Bantuan Pemerintah	0,16	3,79	0,59	2,24
2	Permintaan Pasar Luar Negeri Cukup Besar	0,21	4,36	0,90	3,93
3	Sumberdaya di ZEE Belum Dimanfaat-kan	0,20	3,93	0,77	3,02
4	Tersedianya Kelembaga-an Keuangan	0,07	4,00	0,27	1,08
	Jumlah				10,27
Ancaman					
1	Potensi Terjadi Konflik Nelayan	0,13	4,36	0,68	2,96
2	IUU Fishing/Illegal Fishing	0,12	4,29	0,89	3,80
3	Penegakan Hukum Lemah	0,05	3,64	0,71	2,60
4	Kerusakan Lingkungan (Limbah Dan Racun)	0,04	3,64	0,25	0,90
5	Perubahan Iklim Ekstrim	0,03	3,21	0,11	0,34
	Jumlah				10,60

Pada tabel 8 teridentifikasi bahwa nilai agregat pada faktor peluang dan ancaman hampir sama yaitu 10,27 dan 10,60. Faktor eksternal yang menjadi peluang yaitu permintaan pasar luar negeri dan belum dimanfaatkannya potensi di area ZEE. Faktor eksternal yang menjadi ancaman yaitu potensi terjadinya konflik nelayan. Hal ini dikarenakan nelayan setempat ada yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan sehingga merusak jenis alat tangkap pasif yang digunakan oleh nelayan.

Analisis Matriks SWOT

Analisis SWOT menghasilkan beberapa alternatif strategi. Berdasarkan hasil perhitungan antara S-W yaitu kelemahan dikurangi kelemahan dan perhitungan factor eksternal O-T yaitu peluang dikurangi ancaman. Nilai kekuatan 12,25 dikurangi kelemahan 6,15 adalah 6,10. Nilai factor eksternal yaitu peluang 10,27 dikurangi ancaman yaitu 10,6 adalah -0,33. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang harus diambil adalah strategi ST yaitu dengan memanfaatkan kekuatan dengan meminimalkan ancaman. Alternatif strategi yang dapat diterapkan yaitu meningkatkan peran Pokmaswas melalui penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan, mengoptimalkan peran dan fungsi TPI melalui pembangunan TPI, serta pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui peningkatan sarana dan prasarana unit penangkapan ramah lingkungan.



Gambar 1. Peta Strategi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir dari Hasil Perhitungan Data dan Informasi Tabel IFAS dan EFAS

Hasil Analisis QSPM

Berdasarkan hasil analisis SWOT didapatkan tiga alternatif strategi. Dari hasil penentuan alternatif strategi pada analisis SWOT kemudian dilakukan penilaian *attractive score* dan total *attractive score* dari masing-masing matrix IFAS dan EFAS seperti pada Tabel 9.

Berdasarkan perhitungan analisis QSPM yaitu dengan menilai *attractive score* dan *total attractive score* dari masing-masing faktor internal dan eksternal, didapatkan hasil bahwa urutan alternatif strategi yang perlu dilakukan pertama kali adalah strategi yang mendapatkan jumlah total tertinggi. Urutan alternatif strategi bidang penangkapan di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 1). Pemanfaatan sumberdaya KP melalui peningkatan sarana dan prasarana unit penangkapan ramah lingkungan, 2). Mengoptimalkan peran dan fungsi TPI melalui pembangunan PPI, 3). Meningkatkan peran Pokmaswas melalui penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pengawasan.

Berdasarkan analisis strategi SWOT dan QSPM, untuk mengawal strategis perlu dibuat program yang efektif secara berurutan untuk pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu:

1. Pemanfaatan sumberdaya KP melalui peningkatan sarana dan prasarana unit penangkapan ramah lingkungan dengan program pemberian armada dan alat tangkap yang ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik perairan di wilayah Indragiri Hilir, memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada nelayan terkait penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi TPI melalui pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI). Program pembangunan PPI sangat penting dilakukan agar nelayan dapat mendaratkan hasil tangkapan di PPI. Pengoptimalan fungsi PPI selanjutnya dengan memberlakukan fungsi pelelangan hasil tangkapan untuk menaikkan standar harga jual yang berlaku di pasaran agar meningkatkan pendapatan nelayan.

3. Meningkatkan peran Pokmaswas melalui penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas yang lengkap kepada Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) sehingga mereka dapat segera menangani dengan cepat apabila terjadi upaya pelanggaran penangkapan ikan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 9. Hasil Analisis QSPM

Variabel	Bobot	Meningkatkan peran POKMASWAS melalui penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pengawasan		Mengoptimalkan peran dan fungsi TPI melalui pembangunan PPI		Pemanfaatan sumberdaya KP melalui peningkatan sarana dan prasarana unit penangkapan ramah lingkungan	
		Attractive score	total attractive score	Attractive score	total attractive score	Attractive score	total attractive score
Kekuatan							
Potensi sumberdaya perikanan	0,28	4,20	1,20	4,20	1,20	4,60	1,31
SDM nelayan	0,26	4,40	1,16	5,00	1,32	5,00	1,32
		Jumlah	2,36		2,51		2,63
Kelemahan							
Kelembagaan Kelompok Nelayan	0,17	4,60	0,76	4,40	0,73	3,40	0,56
Teknologi	0,17	4,00	0,66	4,00	0,66	4,60	0,76
Sarana Dan Prasarana	0,09	5,00	0,47	4,60	0,44	5,00	0,47
Pengawasan	0,02	5,00	0,08	260	0,04	2,40	0,04
Permodalan	0,01	1,40	0,02	4,80	0,05	3,80	0,04
		Jumlah	1,23		1,19		1,31
Peluang							
Tersedianya program bantuan pemerintah	0,16	4,20	0,66	3,20	0,50	4,60	0,72
permintaan pasar luar negeri cukup besar	0,21	1,40	0,29	4,20	0,87	4,60	0,95
Sumberdaya di ZEE belum dimanfaatkan	0,20	3,60	0,71	4,00	0,78	5,00	0,98
Tersedianya kelembagaan keuangan	0,07	1,40	0,09	4,80	0,32	4,20	0,28
		Jumlah	1,75		2,48		2,93
Ancaman							
Potensi terjadi konflik nelayan	0,13	4,20	0,56	3,20	0,43	3,00	0,40
IUU Fishing/Illegal fishing	0,12	4,80	0,56	3,60	0,42	3,00	0,35
Penegakan hukum lemah	0,05	4,40	0,21	2,20	0,11	1,80	0,09
Kerusakan lingkungan (limbah dan racun)	0,04	4,00	0,17	1,00	0,04	2,60	0,11
Perubahan iklim ekstrim	0,03	1,00	0,03	1,00	0,03	1,40	0,05
		Jumlah	1,53		1,03		0,99
Jumlah Total			6,86		7,21		7,87

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir sangat besar, namun masih banyak kendala dikarenakan sarana dan prasarana pendukung yang masih minim. Kelembagaan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir juga belum berkembang, baik dari sisi penangkapan, hingga akses permodalan. Alternatif strategi yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu 1). Pemanfaatan sumberdaya KP melalui peningkatan sarana dan prasarana unit penangkapan ramah lingkungan, 2). Mengoptimalkan peran dan fungsi TPI melalui pembangunan PPI, 3). Meningkatkan peran Pokmaswas melalui penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pengawasan. Upaya pengembangan perikanan tangkap yang paling prioritas yaitu pemanfaatan

sumberdaya kelautan dan perikanan melalui peningkatan sarana dan prasarana unit penangkapan ramah lingkungan.

Saran

Pemerintah diharapkan dapat mengakomodasi hal tersebut sehingga usaha perikanan tangkap di Kabupaten Indragiri Hilir dapat meningkat. Selain itu, perlu perhatian pemerintah untuk mengurangi dominasi rantai *patron-client* pada aspek permodalan melalui lembaga permodalan formal dengan persyaratan yang mudah dijangkau nelayan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang mendanai kegiatan ini beserta tim dalam penelitian *Baseline Survey* dan Mapping Sosial Ekonomi dalam mendukung Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal dan Zulkarnain. (2010). Strategi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus Kawasan Panglima Raja Kecamatan Concong). *Berkala Perikanan Terubuk*, Februari 2010, 23-38.
- Bachri, Bachtiar S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol.10 No.1, April 2010, 46-62.
- BPS Kabupaten Indragiri Hilir. 2015. Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka 2015.
- _____. 2017. Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka 2017.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir. 2015. Studi Pencadangan Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Indragiri Hilir. Tembilahan.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap [DJPT]. 2014. Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap nomor-kep.09/DJ-PT/2014 tentang Rencana Strategis Direktorat Sumberdaya Ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Efriansah, Hendi dan M.Y. Tiyas Tinov. 2016. Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2012-2013. *Jurnal JOM FISIP Volume.3 No.1 Tahun 2016* : 1-16
- Juliantoro, Ferry J dan Aris Munandar. 2016. Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan* Vol. 12. No. 02. 1857-1866
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(2), 92–101.
<https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.11.209>
- Muliawan, Irwan et al. (2014). Analisis Stakeholder Pada Perikanan Tangkap Kerapu, *Preliminary Study Menuju Implementasi Ecosystem Approach For Fisheries Management* di Kepulauan Spermonde Kota Makassar. *Jurnal Sosek KP* Vol. 9 No. 2 Tahun 2014, 233-246.
- Retnowati, Endang. 2011. Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum). *Jurnal Pspktif* Volum VI No. 3 Tahun 2011, 149-159.

Sarwanto, Catur et al. (2014). Kajian Sistem Pemasaran Ikan Haisl Tangkapan Nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY. *Jurnal Sosel KP* Vol.9. No. 2. Tahun 2014, 207-217.

Scott (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Sari, T. Ersti Y., S.H.Wisudo, D.R.Monintja, dan T.Purwaka. (2009). Prospek Pengembangan Perikanan Tangkap di Perairan Provinsi Riau (Development Prospect of Capture Fisheries in the Waters of Riau. *Buletin PSP, Vol.XVIII, No.3*, 133-141

Triyanti, Riesti et al. (2014). Peran Jaringan Sosial Nelayan Pada Pemasaran Tuna, Cakalang, dan Tongkol : Studi Kasus di Kota Kendari. *Jurnal Sosel KP* Vol.9. No. 2. Tahun 2014 (219-231). <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/view/1223>